



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No.4 Niti Mandala Telepon (0361) 236213 –  
236058 DENPASAR – 80235

web.: [www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id) e-mail: [info@ptun-denpasar.go.id](mailto:info@ptun-denpasar.go.id)

## **P E N G U M U M A N**

Nomor : 1126 / KPTUN.W7.TUN.3/HK.2.7/XI/2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 1061/KPTUN.W7.TUN.3/HK.2.7/XI/2023, tanggal 22 November 2023 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Nomor: 1062 / KPTUN.W7.TUN.3/HK.2.7/XI/2023, tanggal 22 November 2023, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, Tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Jo. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 28/DJMT/Kep/III/2014, Tanggal 3 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dengan ini diumumkan kepada masyarakat sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau Unit Kerja Advokasi Hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, untuk pendaftaran sebagai Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbentuk Badan Hukum.
2. Memiliki struktur kepengurusan lembaga.
3. Memiliki Akte Pendirian Lembaga dan perubahan Akte terakhir (jika ada).
4. Bukti domisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
5. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
6. Memiliki minimal satu orang Advokat.
7. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum.
8. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
9. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Sarjana Hukum.

Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023.
2. Melakukan seleksi dokumen, hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023.
3. Mengadakan tes kualifikasi, hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023.
4. Memberikan penilaian terhadap calon lembaga pemberi layanan Posbakum, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023.
5. Menetapkan lembaga pemberi layanan Posbakum, hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023.
6. Pengumuman lembaga pemberi layanan Posbakum yang ditunjuk melalui Web Site Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 5 Desember 2023.

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA  
POSBAKUM

KETUA,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN

